

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 2

SUBBAGIAN HUMAS



Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak
Media Online	Kanal 9

Wilayah: Kota Tegal

DPRD Kota Tegal Ingatkan Pemkot Soal Waktu Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK

<https://kanal9.id/dprd-kota-tegal-ingatkan-pemkot-soal-waktu-penyelesaian-tindak-lanjut-temuan-bpk.6887.html>

KOTA TEGAL - Sejumlah fraksi di DPRD mengingatkan waktu penyelesaian tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna persetujuan penetapan raperda Kota Tegal, tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan (LPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 Rabu (13/7).

Dalam rekomendasinya, yang disampaikan Anggota DPRD Anshori Faqih, Badan Anggaran (Banggar) Banggar merekomendasikan Pemerintah Kota Tegal segera menyusun Rencana Aksi (action plan) tindak lanjut rekomendasi BPK pada LPP APBD 2021. Utamanya, atas kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan ditindak lanjuti Pemkot.

"Selain itu, Banggar juga meminta Sekretaris Daerah bersama OPD terkait mengidentifikasi dan melakukan verifikasi duduk persoalan yang sebenarnya. Serta memastikan bagaimana rencana aksi penyelesaian yang telah disusun berjalan dengan konsisten dan tepat waktu,"katanya.

Selanjutnya, kata Ansori Fakih, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab temuan dari sisi kapasitas SDM, tata manajemen prosedur yang memadai sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Sekretaris Daerah juga diminta untuk segera mengkoordinasikan, mensinergikan serta melakukan akselerasi penyelesaian permasalahan atas temuan temuan itu.

Sementara, Fraksi Golongan Karya (F Golkar) dalam rekomendasi yang dibacakan oleh Mohammad Muslim mengingatkan, meskipun menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) namun masih ada beberapa temuan yang harus diselesaikan. Paling lambat 60 hari sejak diterimanya opini yaitu 24 Juni 2022.

"Ini berarti bagi OPD yang hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban dan pemeriksaan fisik masih kekurangan volume pekerjaan, supaya mengirimkan surat tagihan. Sekaligus meminta surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan kepada rekanan, sehingga untuk pemeriksaan yang akan datang tidak menjadikan temuan kembali," ujar Muslim.

Menanggapi itu, Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, menyampaikan pihaknya akan segera melakukan upaya tindak lanjut penyelesaian. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan rencana aksi yang telah dibuat.

"Terkait dengan penyelesaian temuan BPK, kami akan segera melakukan upaya tindak lanjut penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan rencana aksi yang telah dibuat," papar Wali Kota Tegal. (K5/K5)